

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

TEKNIK PERJANJIAN HUKUM: PRINSIP DASAR, TEKNIK PRAKTIS DAN ANTISIPASI SENGKETA

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara,
Senior Partner INTEGRITY Law Firm,
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia.

Jakarta, 27 Februari 2026

www.integritylawfirm.com

AGENDA WEBINAR INTEGRITY SHARING

Agenda webinar INTEGRITY Sharing ini diadakan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kedepan. Waktu pelaksanaannya 2 (dua) Minggu setelah webinar Australia, INTEGRITY Lawyers, diadakan.

1. Menjadi Advokat yang Cuan dan Cendekiawan
2. Menjadi Lawyer Hebat: Mengasah Keahlian Menulis
3. Seni Berbicara Meyakinkan: Skill Wajib Lawyer Hebat
4. Menjadi Lawyer Handal: Mengasah Kemampuan Bernegosiasi
5. Teknik & Strategi Penyusunan Dokumen: Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi
6. Strategi Menyusun Dokumen dan Alat Bukti dalam Sengketa TUN

AGENDA WEBINAR INTEGRITY SHARING

Agenda webinar INTEGRITY Sharing ini diadakan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kedepan. Waktu pelaksanaannya 2 (dua) Minggu setelah webinar Australia, INTEGRITY Lawyers, diadakan.

7	8	9	10	11	12
Teknik Perjanjian Hukum: Prinsip Dasar, Teknik Praktis Dan Antisipasi Sengketa	Tips & Trik Mencari Klien	Teknik dan Strategi Melakukan Legal Audit	Teknik dan Strategi Penyusunan Legal Opinion	Kiat Sukses Membangun Law Firm Bereputasi	Meniti Karir Hukum dan Menjadi Lawyer di Australia

INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

ALUR PEMBAHASAN



www.integritylawfirms.com

01 PRINSIP DASAR PERJANJIAN

02 UNSUR-UNSUR PERJANJIAN

03 STRUKTUR STANDAR PERJANJIAN

04 TEKNIK PRAKTIS DRAFTING

05 ANTISIPASI SENGKETA



1

PRINSIP DASAR PERJANJIAN

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com

DEFINISI & RUANG LINGKUP

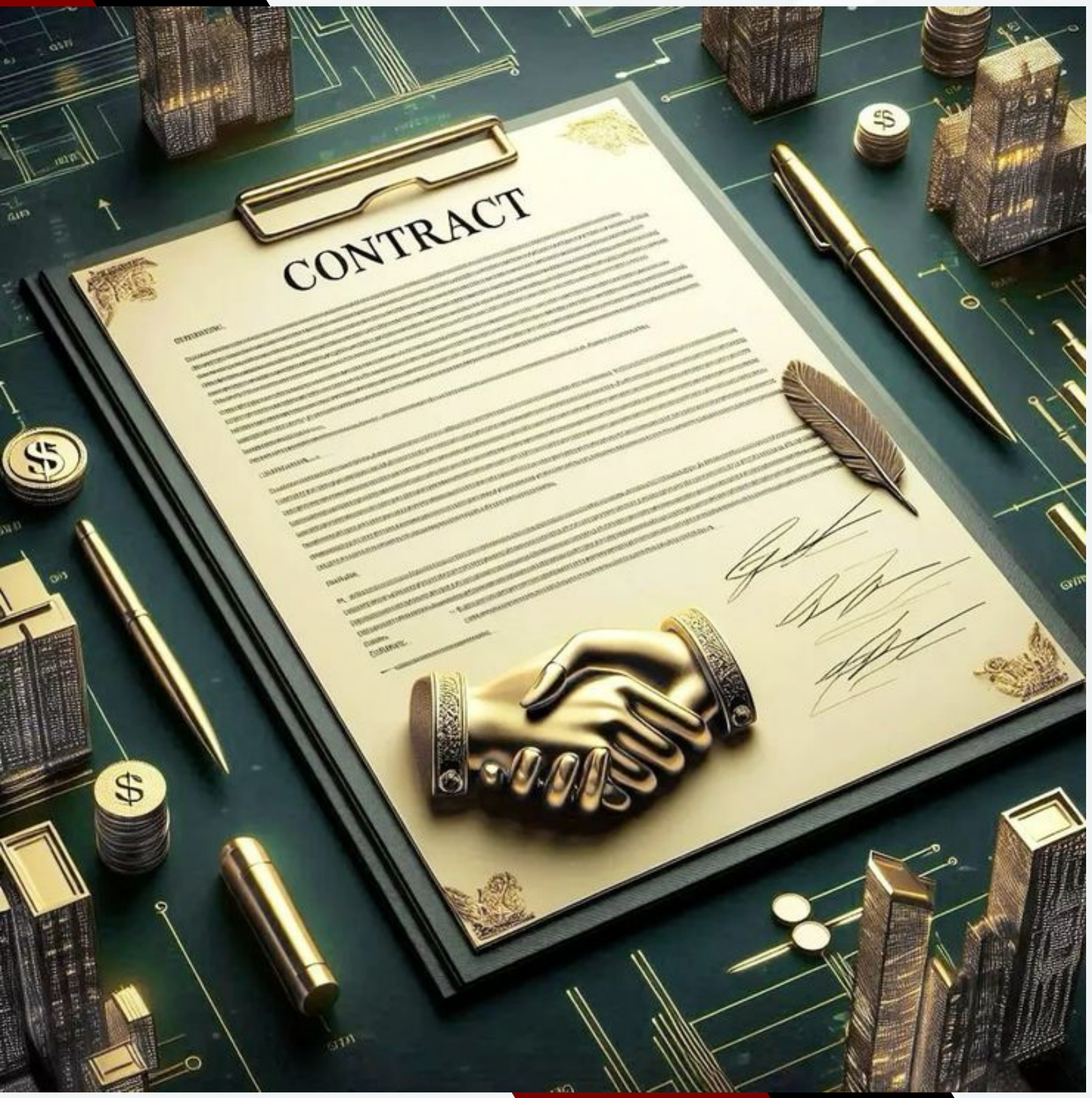
Pasal 1313 KUH Perdata
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Esensi Perjanjian
Merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban (prestasi) bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Jenis Perjanjian
Nominaat (Bernama): Diatur khusus dalam KUHPer (Jual beli, Sewa menyewa).
Innominaat (Tak Bernama): Timbul dari asas kebebasan berkontrak (Leasing, Franchise, Joint Venture).



TUJUAN DARI PERJANJIAN



1.Mengikat dan mengatur hubungan hukum para pihak
Kontrak menciptakan hubungan hukum yang jelas antara pihak-pihak yang terikat, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai sumber perikatan sesuai dengan Pasal 1313 *jo* Pasal 1320 KUH Perdata**.**

2.Menciptakan kepastian dan keamanan hukum
Perjanjian menjamin kepastian tentang apa yang boleh dan harus dilakukan para pihak, sehingga pelaksanaan dan penegakan kontrak dapat diprediksi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

3. Menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban perdata
Syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal), sejalan dengan Pasal 1320 jo. Pasal 1233 KUH Perdata.

4.Mengalokasikan risiko dan mengatur mekanisme bila terjadi masalah
membagi dan mengelola risiko secara teratur sesuai asas kebebasan berkontrak yang diakui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

5.Menjadi alat bukti tertulis atas hubungan hukum
memberikan bukti formal yang dapat digunakan bila terjadi sengketa, selaras dengan fungsi kontrak sebagai dokumen tertulis

integrity@integritylawfirms.com

PERJANJIAN ELEKTRONIK

JENIS-JENIS PERJANJIAN ELEKTRONIK

1. ***Click-Wrap Agreement***
   Perjanjian yang disetujui dengan cara mengklik tombol "Saya Setuju" atau "*I Agree*".
   Contoh: persetujuan syarat dan ketentuan saat mendaftar aplikasi atau platform digital.

2. ***Browse-Wrap Agreement***
   Perjanjian yang dianggap disetujui ketika pengguna menggunakan suatu website atau layanan tanpa harus mengklik persetujuan secara eksplisit.

3. ***Electronic Signature Agreement***
   Perjanjian yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik, baik tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi, yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

4. ***Email Agreement***
   Perjanjian yang terbentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik seperti email, sepanjang terdapat kesepakatan para pihak atas substansi yang diperjanjikan.

5. ***Digital Contract berbasis Platform***
   Perjanjian yang dibuat melalui platform digital khusus seperti marketplace, financial technology, atau contract management system.

KARAKTERISTIK PERJANJIAN ELEKTRONIK

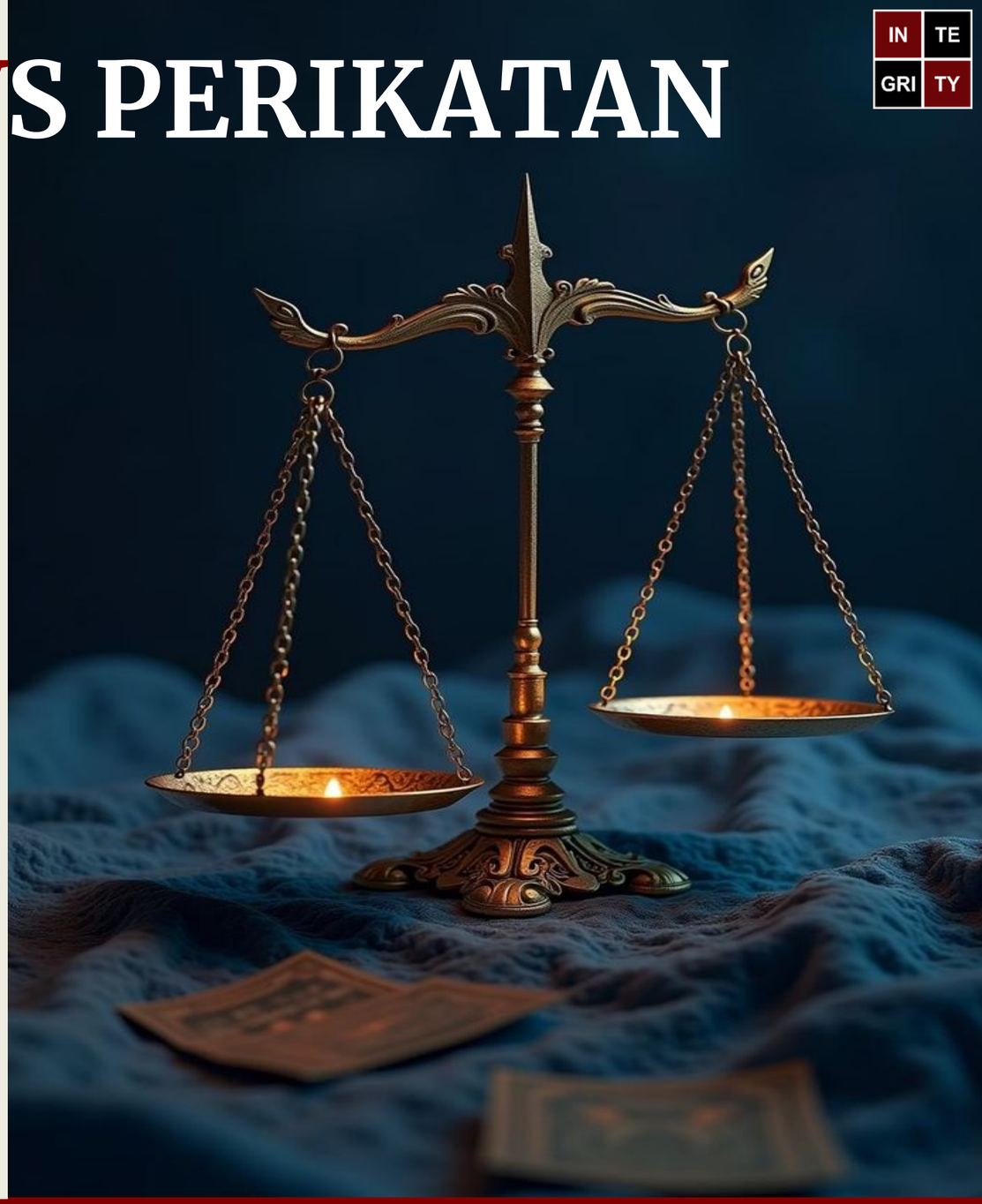
- ❑ Dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak
- ❑ Menggunakan dokumen elektronik
- ❑ sebagai media utama
- ❑ Dapat menggunakan tanda tangan elektronik
- ❑ Memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional
- ❑ Dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa

PERJANJIAN VS PERIKATAN

PERJANJIAN (OVEREENKOMST)
Sumber lahirnya perikatan. Merupakan peristiwa konkrit berupa kesepakatan dua pihak.

PERIKATAN (VERBINTENIS)
Hubungan hukum abstrak. Mencakup hubungan yang lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang.

"Semua perjanjian adalah perikatan, namun tidak semua perikatan adalah perjanjian."



ASAS-ASAS UTAMA

Kebebasan Berkontrak *(Freedom of Contract)*
Setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, dengan siapa saja, dan menentukan isinya, selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. `Pasal 1338 (1) KUHPer`

Konsensualisme *(Consensualism)*
Perjanjian lahir pada detik tercapainya kata sepakat (konsensus) antara para pihak. Tidak diperlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh UU (misal: hibah tanah). `Pasal 1320 (1) KUHPer`

Kepastian Hukum *(Pacta Sunt Servanda)*
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.
`Pasal 1338 (1) & (2) KUHPer`

Kepribadian *(Privity of Contract)*
Seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya untuk diri sendiri. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak merugikan pihak ketiga. `Pasal 1315 & 1340 KUHPer`

Asas Itikad Baik (Good Faith)

"Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." — ***Pasal 1338 (3) KUHPerdata***

Pra-Kontrak (Subjektif) Kejujuran pada saat negosiasi. Tidak menyembunyikan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lawan.

Pelaksanaan (Objektif) Pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan (kewajaran) yang berlaku di masyarakat.

KUNCI UTAMA: FAIRNESS
Keseimbangan posisi tawar para pihak

integrity@integritylawfirms.com

SYARAT SAH PERJANJIAN

PASAL 1320 KUHPer

1. Sepakat SYARAT SUBJEKTIF
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Harus bebas dari paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog).

2. Cakap SYARAT SUBJEKTIF
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pihak harus dewasa (21 tahun atau sudah menikah) dan tidak di bawah pengampuan (curatele).

3. Suatu Hal Tertentu SYARAT OBJEKTIF
Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, serta dapat diperdagangkan.

4. Suatu Sebab yang Halal SYARAT OBJEKTIF
Kausa hukum (tujuan) perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

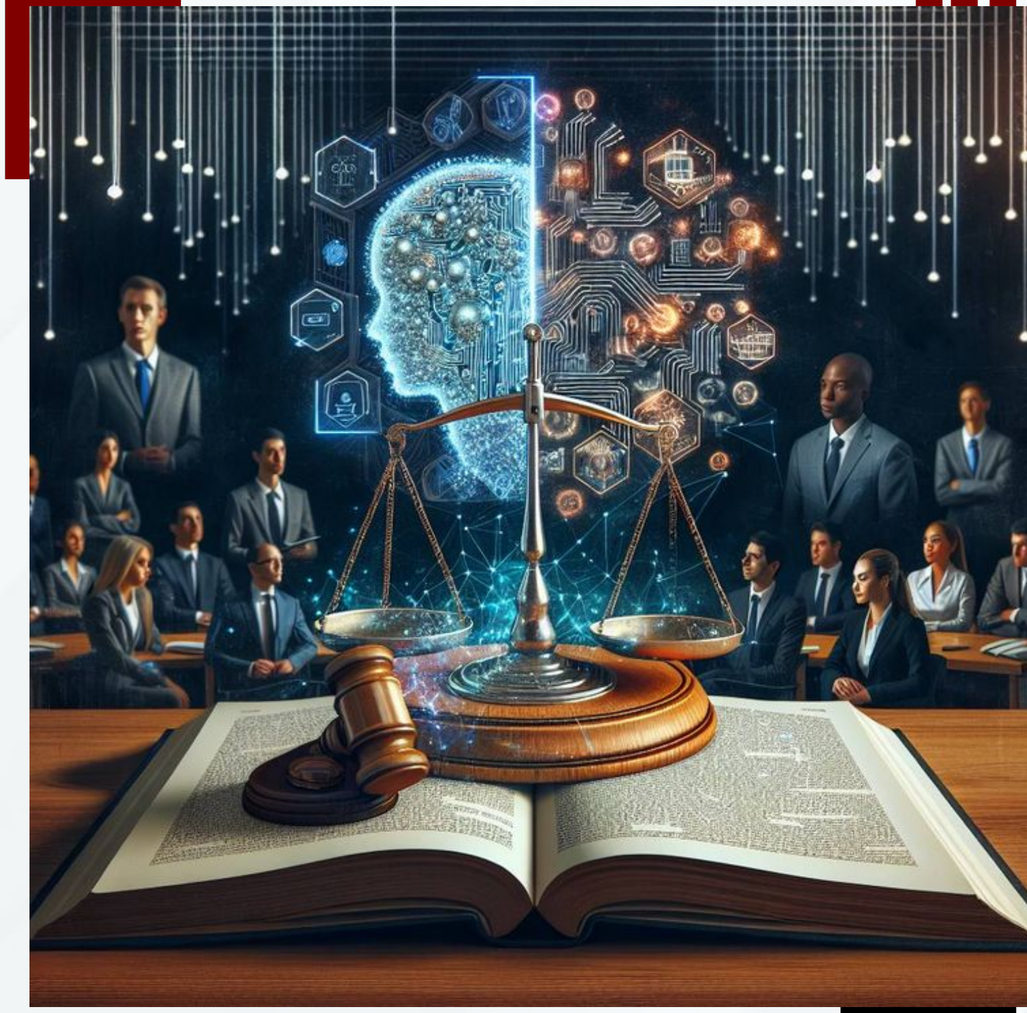


AKIBAT HUKUM PELANGGARAN

MELANGGAR SYARAT SUBJEKTIF (1 & 2)Dapat Dibatalkan (Voidable). Perjanjian tetap sah dan mengikat sampai dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan (misal: pihak yang tidak cakap atau yang mengalami cacat kehendak).

MELANGGAR SYARAT OBJEKTIF (3 & 4)Batal Demi Hukum (Null and Void). Perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal (null/void ab initio). Tidak ada dasar hukum untuk menuntut pemenuhan.

"Pembedaan ini krusial dalam menentukan strategi penyelesaian sengketa."





2

UNSUR-UNSUR PERJANJIAN

UNSUR-UNSUR PERJANJIAN

Essensialia
UNSUR POKOK / MUTLAK

inti pokok yang menjadikan kontrak itu **“ada”** dan memenuhi **syarat objektif** Pasal 1320 KUH Perdata;.

CONTOH DALAM JUAL BELI:
*"Sepakat mengenai **Barang** (objek) dan **Harga**."*

Naturalia
UNSUR BAWAAN / DEFAULT

isi pelengkap yang akan mengikuti undang-undang dan kebiasaan jika tidak diatur lain, sebagaimana logika Pasal 1338–1339 KUH Perdata;

CONTOH DALAM JUAL BELI:
*"Penjual wajib menanggung **cacat tersembunyi** (Pasal 1491 KUHPerdata), kecuali diperjanjikan 'sold as is'."*

Accidentalia
UNSUR TAMBAHAN / PELENGKAP

Unsur yang tidak diatur UU dan tidak wajib ada, namun ditambahkan secara khusus murni dari kebebasan berkontrak para pihak dan hanya mengikat jika secara tegas diperjanjikan

.

CONTOH KETENTUAN KHUSUS:
*"Ketentuan mengenai **Denda**keterlambatan, pilihan domisili hukum, atau metode pembayaran spesifik."*

integrity@integritylawfirms.com

CONTOH PENERAPAN

Perjanjian Jual Beli

ESSENSIALIA (WAJIB ADA)
Barang & Harga
•Objek: Mobil Merek XXX Tahun XXX
•Harga: Rpxxx.000.000,-

NATURALIA (BAWAAN UU)
Jaminan Cacat & Eviksi
•Penjual menjamin mobil bebas sengketa hukum (vrijwaring).
•Penjual bertanggung jawab atas cacat mesin tersembunyi

ACCIDENTALIA (TAMBAHAN)
Ketentuan Khusus
•Bonus asuransi all-risk 1 tahun.
•Layanan servis gratis 3x.
•Pilihan domisili hukum di PN Jakarta Selatan.



Perjanjian Jasa Hukum

ESSENSIALIA (WAJIB ADA)
Layanan & Honorarium
•Lingkup Jasa: Pendampingan hukum perkara XXX
•Honorarium: *Success fee* 10% dari nilai pemulihan.

NATURALIA (BAWAAN UU)
Standar Profesi
•Kewajiban bertindak dengan keahlian dan kehati-hatian (duty of care).
•Bukan perikatan hasil (inspanningsverbintenis), tapi upaya.

ACCIDENTALIA (TAMBAHAN)
Ketentuan Khusus
•KPI: Laporan mingguan via email setiap Jumat.
•Kerahasiaan data klien seumur hidup.
•Larangan mewakili pihak lawan (conflict of interest clause).

integrity@integritylawfirms.com



3

STRUKTUR STANDAR PERJANJIAN

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com

STRUKTUR STANDAR PERJANJIAN 1/2

1

BAGIAN AWAL

- Judul Perjanjian
- Nomor & Tanggal
- Komparisi (Identitas Para Pihak)
- Kewenangan Bertindak

2

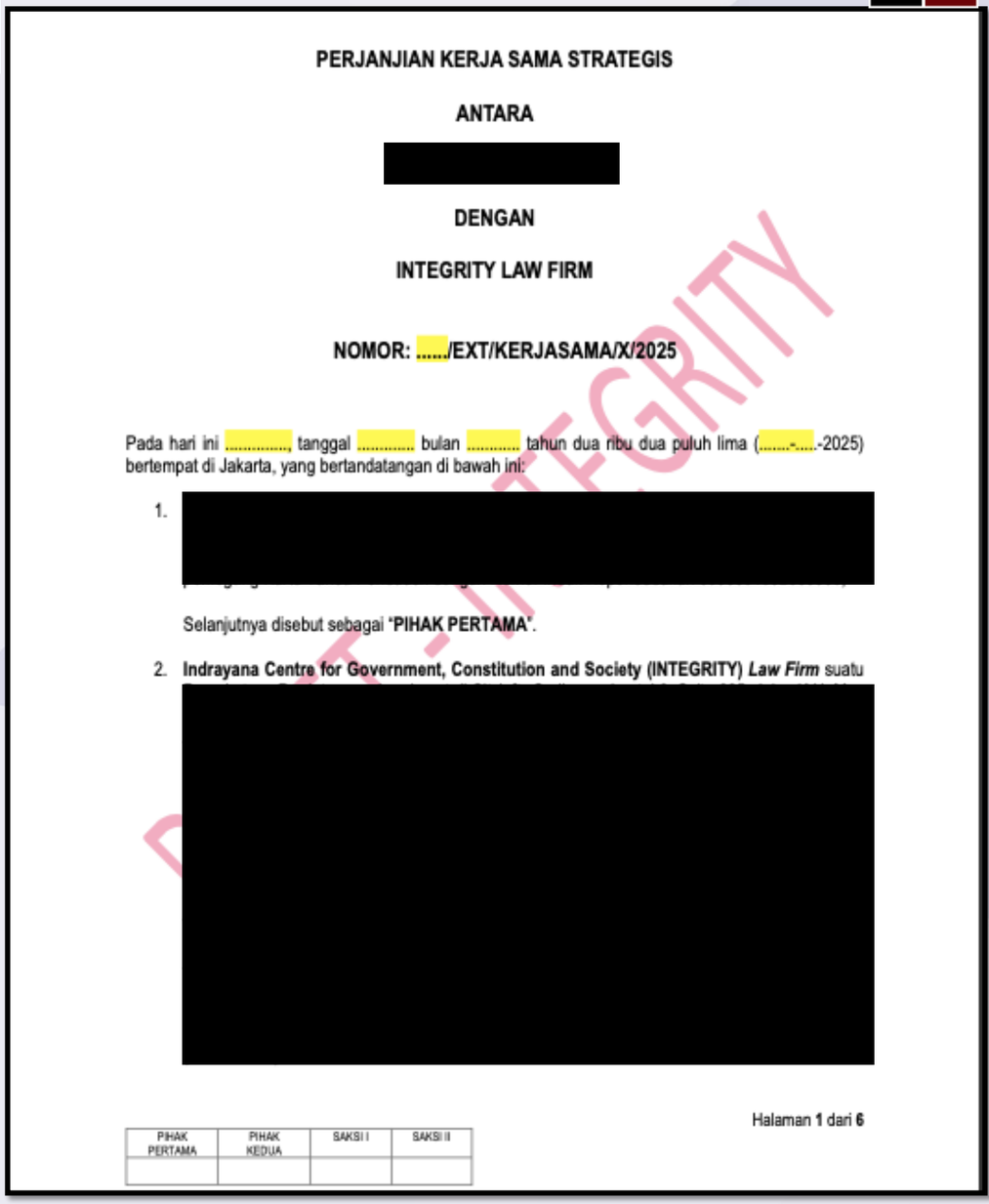
LATAR BELAKANG

- Premisse / Recitals
- Maksud & Tujuan
- Kronologis singkat
- Keterkaitan dengan akta lain

3

DEFINISI

- Pasal 1: Definisi & Interpretasi
- Penjelasan istilah kunci
- Aturan penafsiran (tunggal/jamak)
- Hirarki dokumen



PERJANJIAN KERJA SAMA STRATEGIS

ANTARA

[redacted]

DENGAN

INTEGRITY LAW FIRM

NOMOR: ...../EXT/KERJASAMA/X/2025

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. [redacted]

   Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY)** ***Law Firm*** suatu [redacted]

Halaman **1** dari **6**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	SAKSI I	SAKSI II

integrity@integritylawfirms.com

STRUKTUR STANDAR PERJANJIAN 2/2

4

KETENTUAN ISI

- Ruang Lingkup Perjanjian
- Hak & Kewajiban Para Pihak
- Nilai Transaksi & Cara Bayar
- Jangka Waktu & Wanprestasi

5

KETENTUAN UMUM

- Force Majeure (Keadaan Kahar)
- Kerahasiaan (Confidentiality)
- Penyelesaian Sengketa
- Hukum yang Berlaku

6

PENUTUP

- Klausul Penutup (Severability)
- Tanda Tangan Para Pihak
- Saksi-saksi (jika ada)
- Lampiran-lampiran

PASAL 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. Menerima pembayaran *marketing fee* dari PIHAK KEDUA.

b. Menerima informasi yang sesuai mengenai besaran honorarium yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari klien PIHAK PERTAMA atas penanganan [redacted] yang dilakukan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Menerima pengalihan penanganan pengurusan pembuatan [redacted] dialami oleh klien PIHAK PERTAMA.

b. Menerima honorarium dari klien PIHAK PERTAMA.

BAB IV

MARKETING FEE DAN MEKANISME PEMBAYARAN

PASAL 5

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan menerima *marketing fee* [redacted] honorarium bersih yang diterima PIHAK KEDUA dari klien PIHAK PERTAMA atas penanganan pembuatan visa yang hanya dilakukan oleh PIHAK KEDUA; atau

(2) *Marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah klien PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA..

BAB VI

FORCE MAJEURE

PASAL 9

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan memaksa) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, antara lain bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, terorisme, peperangan, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan/atau lainnya yang diluar kemampuan PARA PIHAK.

(2) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

DRAFT - INTEGRITY



4

TEKNIK PRAKTIS DRAFTING

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com



TEKNIK DRAFTING

Ringkas, Langsung & Terukur
Gunakan kalimat pendek dan efektif. Hindari kata-kata "bunga" yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Pastikan parameter (jumlah, waktu, standar) terukur jelas.

Satu Pasal = Satu Gagasan
Hindari menumpuk berbagai kewajiban berbeda dalam satu ayat yang panjang. Pecah menjadi poin-poin agar mudah dipahami dan dirujuk.

Hindari Jargon Berlebih
Gunakan Bahasa Indonesia hukum yang baku. Hindari istilah teknis (engineering, finance) yang tidak umum tanpa definisi. Hindari kata ambigu seperti "kurang lebih" atau "sewajarnya".

integrity@integritylawfirms.com

HINDARI AMBIGUITAS

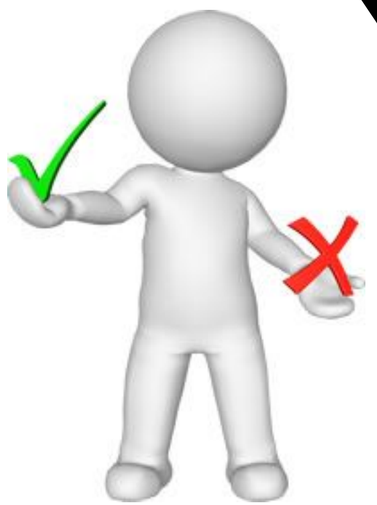
Gunakan Angka & Huruf
Untuk menghindari salah ketik atau salah baca pada nilai nominal penting, selalu tuliskan angka diikuti dengan huruf dalam kurung.

Tentukan Subjek Pelaku dengan Tegas
Jangan gunakan kalimat pasif tanpa pelaku yang jelas. Pastikan setiap kewajiban memiliki subjek (Pihak Pertama, Pihak Kedua) yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Standar Kinerja (KPI) Spesifik
Hindari kata sifat kualitatif yang subjektif seperti "baik", "layak", atau "segera". Gunakan ukuran kuantitatif yang dapat diverifikasi secara objektif.



Do’s & Don’ts



✓ DO (Lakukan)

Konsistensi Istilah
Gunakan definisi yang sama ("Klien" vs "Pemberi Kerja") di seluruh dokumen secara konsisten.

Mekanisme Perubahan
Selalu cantumkan klausul amandemen/addendum untuk mengakomodasi perubahan di masa depan.

Audit Risiko (Mitigasi)
Identifikasi potensi sengketa (mis: keterlambatan) dan siapkan solusinya dalam pasal.

X DON'T (Hindari)

Copy-Paste Tanpa Adaptasi
Mengambil klausul dari perjanjian lain tanpa menyesuaikan subjek, objek, dan konteks hukumnya.

Istilah Ambigu / Kabur
Hindari kata subjektif seperti "secepatnya", "secara wajar", atau "kurang lebih" tanpa parameter.

Klausul Bertentangan
Pasal yang saling menegasikan (mis: Pasal 5 sebut denda 5%, Pasal 10 sebut bebas denda).



5

ANTISIPASI SENGKETA

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com

IDENTIFIKASI & PEMETAAN RESIKO

❑ Identifikasi Area Rawan (Vulnerable Areas)

Fokuskan ketelitian drafting pada klausul sensitif:

- **Harga & Pembayaran:** Valuta, pajak, denda.
- **Spesifikasi & KPI:** Tolok ukur kinerja yang terukur.
- **Perubahan Lingkup:** Mekanisme *Variation Order*.

❑ Mitigasi & Fallback Options

Rancang klausul "pengaman" jika terjadi deadlock:

- **Remedy Period:** Hak memperbaiki sebelum terminasi.
- **Step-in Rights:** Hak mengambil alih pekerjaan sementara.
- **Liability Cap:** Batasan maksimal ganti rugi.

Peta Risiko (Risk Map)

Medium Risk
Sering terjadi, dampak kecil.
(Contoh: Keterlambatan minor)

CRITICAL
Sering terjadi & Dampak besar.
Prioritas Drafting Utama

Low Risk
Jarang terjadi, dampak kecil.
(Standar klausul)

High Risk
Jarang terjadi, dampak fatal.
(Contoh: Force Majeure, Default)

"Semakin tinggi risiko, semakin detail klausul yang dibutuhkan."

integrity@integritylawfirms.com

TEKNIK DRAFTING PRESISI



DEFINISI & INTERPRETASI TEGAS

Menghilangkan ruang tafsir ganda dengan definisi spesifik di awal perjanjian.

- Definisikan "Hari Kerja" vs "Hari Kalender".
- Tentukan mata uang dan kurs yang digunakan.
- Hindari kata ambigu seperti "Segera" atau "Wajar" tanpa parameter waktu.

STANDAR KINERJA TERUKUR

Menggunakan parameter objektif untuk menilai wanprestasi.

- Tetapkan KPI (Key Performance Indicators) kuantitatif.
- Cantumkan SLA (Service Level Agreement) detail.
- Spesifikasi teknis barang/jasa dalam lampiran terpisah yang mengikat.

integrity@integritylawfirms.com

REVIEW & AUDIT

Legal Review Berjenjang
Terapkan mekanisme pemeriksaan berlapis (Drafter → Senior → Partner). Gunakan metode *Peer Review* antar rekan sejawat untuk mengidentifikasi celah yang mungkin terlewat (blind spots).

Preventive Legal Audit & Clause Library
Lakukan audit proaktif terhadap draf kontrak sebelum finalisasi. Bangun dan manfaatkan *Clause Library* (bank klausul) standar yang telah teruji validitasnya untuk menjaga konsistensi.

War Game Skenario Sengketa
Simulasikan skenario terburuk (*Worst-Case Scenario*) sebelum tanda tangan. Uji ketahanan setiap pasal seolah-olah sengketa sudah terjadi untuk memastikan posisi hukum klien aman.

Mengapa Review Penting?

OBJEKTIVITAS
Menghilangkan bias subjektif drafter tunggal. Mata kedua seringkali melihat apa yang mata pertama lewatkan.

EFISIENSI BIAYA
Biaya perbaikan draft (preventif) jauh lebih rendah dibandingkan biaya litigasi (kuratif) akibat pasal yang lemah.





"Drafting yang jelas, ringkas, dan tidak ambigu adalah benteng pertahanan pertama untuk mencegah sengketa di masa depan."

- Denny Indrayana

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy









https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/



https://www.integritylawfirms.com

integrity@integritylawfirms.com

We are the INTEGRITY





Jakarta, Indonesia

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, **Jakarta** 10220
Phone : +62 21 2555 8836

Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Phone : 1300 912 889

Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889

www.integritylawfirms.com

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

Contact Us

Thank You

825, Citylofts Sudirman, Jakarta

integrity@integritylawfirms.com

+62 817-726-299

www.integritylawfirms.com

